

POLITIK DALAM PERSPEKTIF HINDU



Oleh

I Wayan Latra, S.Ag,M.Si.

NIP 195812311981031049

UPT PENDIDIKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

UNIVERSITAS UDAYANA

2017

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadapan Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Mahaesa atas rahmat yang dilimpahkan sehingga penelitian yang berjudul “**Politik Dalam Perspektif Hindu**” dapat diselesaikan. Dalam pelaksanaan penelitian ini tidak sedikit hambatan yang dihadapi, namun berkat karunia-Nya akhirnya segala rintangan tersebut dapat diatasi.

Keberhasilan penelitian ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya, kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tulisan ini

Disadari sepenuhnya atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki sehingga karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Untuk hal itu diharapkan masukan, kritik, dan saran dalam penyempurnaannya, serta untuk menambah wawasan dan cakrawala pengetahuan peneliti.

Akhirnya atas segala bantuan Bapak/Ibu/Sdr., peneliti doakan semoga mendapat pahala yang berlipat dari Tuha Yang Mahaesa.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, Maret 2017

Peneliti,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.4 Batasan Masalah.....	2
II POLITIK DALAM PESPEKTIF HINDU	2
2.1 Pengertian dan Sumber Ajaran Hindu Tentang Politik (Nitisastra)	3
2.2 Sumber Ajaran Hindu Tentang Politik (Nitisastra)	4
2.2.1 Kitab-Kitab Veda (Sruti)	5
2.2.2 Kitab-Kitab Smerti	5
2.2.3 Kitab-Kitab Itihasa	6
2.2.4 Kitab-Kitab Purana	6
2.2.5 Kitab-Kitab, Lontar-Lntar Maupun Naskah-Naskah Lainnya ...	6
2.3 Kontribusi Agama Hindu Dalam Kehidupan Politik	7
2.3.1 Dari Negara Kesatuan Terpuruk ke Alam Penjajahan	8
2.3.2 Lahir Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9
2.3.3 Kontribusi Agama Hindu Dalam Kehidupan Politik Berbangsa dan Bernrgara	10
2.4 Ajaran Kepemimpinan/Politik Hindu	12
2.4.1 Catur Pariksa	12
2.4.2 Asta Brata	13
2.4.3 Pancadasa Paramiteng Prabhu	14
2.4.4 Sadwarnaning Rajaniti	15
2.4.5 Panca Upaya Sandhi	15
2.4.6 Navanatya	16

III KESIMPULAN	17
IV DAFTAR PUSTAKA.....	18

POLITIK DALAM PERSPEKTIF HINDU

I PENDAHULUAN

Politik dalam bahasa Indonesia dapat disamakan dengan kata Nitisastra pada bahasa Sansekerta. Terdiri dari kata “Niti” yang berarti kemudi, pimpinan, politik dan sosial etik, pertimbangan, kebijakan. Kata “Sastra” berarti aturan, nasihat, ajaran.

1.1 Latar Belakang

Lahirnya bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan Lambang Burung Garuda, Semboyan Bhineka Tunggal Ika adalah sangat tepat didukung pemilihan amat cermat daripada pendiri Negara yang mengamati Negara Indonesia yang majemuk.

Gerakan penolakan terhadap politisi buruk terus menggelinding. Tetapi banyak yang pesimis terhadap gerakan ini. Sebab, kesadaran seperti itu banyak lahir di kalangan intelektual. Sedangkan di tenagah-tengah masyarakat berkembang pragmatism politik yang sangat mengawatirkan. Terdapat kecenderungan yang mengemukakan bahwa partai apapun yang bisa memberikan bantuan dana akan didukung masyarakat. Sebab masyarakat khususnya masyarakat Bali yang beragama Hindu, menanggung beban pembangunan yang demikian besar, dari pembangunan balai banjar sampai pembangunan atau perbaikan pura yang menghabiskan dana tidak sedikit. Proses pergantian kekuasaan pemerintahan Negara harus terus terjadi. Proses ini bagaimanapun juga akan menampung dinamika masyarakat Bali. Jadi perkembangan kesadaran masyarakat akan tercermin dari pilihan-pilihan politiknya.

Bagaimana pun juga sebuah masyarakat tentulah mengharapkan perbaikan yang terus menerus. Setiap hari haruslah melahirkan perbaikan. Dalam bahasa ritual masyarakat Bali, proses politik ini haruslah bisa menjadi proses penyucian atau sudamala bagi masyarakat Bali. Sebab dalam pandangan agama Hindu, yuddha (peperangan) juga dipandang sebagai proses penyucian. Jadi, segala aktivitas dunia ini bisa dipandang dalam khasanah penyucian tersebut termasuk proses kerja. Karena itulah proses politik yang terjadi mestilah dipandang sebagai proses penyucian, sehingga akhir dari proses ini tidak mendudukkan orang-orang yang ternoda dalam pemerintahan.

Sebab bagaimana mungkin mereka yang tidak bisa melenyapkan noda dalam dirinya, bisa melenyapkan noda masyarakat.

Penyusunan paper ini menggunakan metode kepustakaan. Di mana langkah pertama adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber yang nantinya disusun menjadi sebuah paper.

1.2 Rumuasan Masalah

1.2.1 Apa yang dimaksud dengan politik?

1.2.2 Dalam Agama Hindu, kitab apa saja yang memuat tentang politik

1.2.3 Bagaimana politik menurut perspektif Hindu?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Untuk mengetahui tentang politik

1.3.2 Untuk mengetahui kitab apa saja yang memuat tentang politik kaitannya dalam agama Hindu

1.3.3 Untuk mengetahui politik menurut perspektif Hindu

1.4 Batasan Permasalahan

Untuk memahami politik yang bersumber dari ajaran Agama Hindu serta mendeskripsikan kontribusi agama hindu dalam kehidupan politik.

II POLITIK DALAM PERSPEKTIF HINDU

Kata Politik yang dikenal dalam bahasa Indonesia dapat disamakan dengan kata Nitisastra dalam sastra-sastra Hindu. Kata atau istilah Nitisastra ini berasal dari kata-kata Niti dan kata Sastra dalam Bahasa Sansekerta. Dalam kamus kecil Sansekerta Indonesia yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tmgkat Satu Bali, kata Niti berarti: Kemudi, Pimpinan, Politik dan Sosial Etik, Pertimbangan dan Kebijakan. Kata Sastra, berarti perintah, ajaran, nasehat, aturan tulisan ilmiah. Menurut Mardiwarsito dalam kamus bahasa Jawa kunonya, kata Niti berarti: Kebijakan Politik atau Ilmu Tata Negara, Sastra, berarti: Ilmu Pengetahuan atau kitab pelajaran. Dalam kamus Sansekerta Inggris karya Arthur Mac Donnel kata Niti berarti Wordly Wisdom (Kebijakan Duniawi) Etika Sosial Politik dan Tuntunan Politik. Sebagai istilah kata Nitisastra diartikannya sebagai Etika Politik.

2.1 Pengertian Dan Sumber Ajaran Hindu Tentang Politik (Nitisastra)

Nitisastra adalah pengetahuan tentang politik negara. Sebagai suatu istilah Nitisastra dapat bermakna sebagai kebijakan yang berhubungan dengan Etika Sosial Politik untuk menyelenggarakan pemerintahan suatu Negara. Pada umumnya setiap Negara selalu berupaya membuat agar masyarakatnya sejahtera, sehingga pemahaman tentang Nitisastra akan lebih meluas lagi, yaitu: ilmu pengetahuan tentang politik untuk menyelenggarakan pemerintahan suatu Negara dalam rangka mencapai cita-cita Negara membangun masyarakat sejahtera. Ajaran Nitisastra dalam sastra-sastra Hindu tidak pernah lepas dari pembahasan tentang pentingnya upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Jadi politik dalam perspektif Hindu adalah pengetahuan untuk menyelenggarakan-pemerintahan suatu Negara guna mencapai tujuan menciptakan masyarakat sejahtera.

Selain istilah Nitisastra dalam, sastra-sastra Hindu dikenal pula istilah Dandhaniti, Raja Dharma, Raja Niti dan istilah yang paling tua adalah Arthaveda atau Arthasastra. Dandha Niti kadang-kadang dikaitkan dengan aspek hukum sebagai bagian dari politik Raja Dharma dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban pemerintahan atau kepala Negara. Raja dapat disamakan dengan kepala Negara atau kepala pemerintahan. Raja Niti sebagai politik pemerintah secara luas sedangkan Arthasastra sering diartikan ilmu pengetahuan pemerintahan.

Sesungguhnya banyak penulis tentang Nitisastra, diantaranya : Bhagavan Manu. Yadnya Valkya, Usana, Brhaspati, Visalaksa, Bhagavan Sukra, Bharadvaja, Parasara dan Kautilya atau Bhagavan Canakya. Yang terkenal diantaranya Bhagavan Manu yang menulis Manava Dharmasastra yang ajarannya kemudian hari dipopulerkan oleh Bhagavan Bhrigu. Dalam kitab Manava Dharmasastra dipakai istilah Raja Dharma dan ada penekanan bahwa Negara wajib melindungi segenap ciptaan Tuhan yang ada diwilayahnya. Bhagavan Canakya yang dikenal pula dengan nama Kautilya menulis Canakya Nitisastra yang sangat populer. Selain memuat ajaran tentang Nitisastra banyak pula memuat tentang tata susila dan masalah sosial lainnya seperti pendidikan anak-anak dan lain sebagainya. Karya Nitisastra ini dianggap pula menyatukan pandangan para Rsi penulis-penulis sebelumnya.

2.2 Sumber Ajaran Hindu Tentang Politik (Nitisastra)

Untuk memahami sumber ajaran Hindu yang menguraikan Nitisastra perlu terlebih dahulu dipahami kedudukan Veda sebagai Kitab Suci sumber ajaran Agama Hindu. Bagi umat Hindu atau kelompok masyarakat Hindu kitab suci yang menjadi sumber ajaran dan sumber hukum adalah Veda.

Ketentuan mengenai Veda sebagai kitab suci secara tegas dinyatakan dalam kitab smerti Manava Dharmasastra sebagai berikut :

Manavadharmasastra II.6
*Vedo 'khilo dharma mulam
Smrtisile ca tadvidam
acarascacaiva sadhunam
amanastustir eva ca*

(Seluruh Veda merupakan sumber utama daripada Dharma (Agama Hindu) kemudian barulah Smrti disamping sila kemudian acara serta akhirnya Atma Tusti (rasa puas diri sendiri).

Sila adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang suci penghayat Veda dan acara adalah tradisi-tradisi dari orang-orang suci.

Sebagai diketahui Dharma adalah nama awal dari Agama Hindu juga disebut Sanatana Dharma sedangkan nama Hindu yang dikenal sekarang ini adalah nama yang dikenal belakangan. Nama Hindu dimaksudkan untuk menyebut Agama dan kepercayaan termasuk kebudayaan yang bersumber kitab suci Veda.

Manavadharmasastra II.10

*SRUTISTU VEDO VIJNEYO
DHARMASASTRATRAMTU VI SMRTIH
TESARVAMTHESVAMIMAMSYE
TABHYAM DHARMOHI NIRBABHAU*

(Sesungguhnya Sruti (Wahyu) adalah: Veda, demikian pula Smerti itu adalah Dharma sastra, keduanya harus tidak boleh diragukan dalam hal apapun juga karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber Agama Hindu (Dharma).

Sebagai kitab suci agama Hindu “Veda” adalah sumber ajarannya karena dari Vedalah mengalir semua ajaran yang merupakan kebenaran Agama Hindu. Ajaran Veda dikutip kembali diinterpretasikan dan diterjemahkan dalam berbagai tulisan member!

vitalitas terhadap kitab-kitab susastra Hindu pada masa berikutnya. Dalam kitab Vedalah mengalir ajaran dan dikembangkan dalam kitab-kitab Smerti, Itihasa, Purana, Tantra, Darsana, Upanisad maupun Lontar-Lontar Tattwa yang ada sekarang ini. Dalam kitab-kitab inilah ajaran-ajaran Niti Sastra dapat dijumpai.

2.2.1 Kitab-Kitab Veda (Sruti)

Bila dicermati pemikiran tentang Nitisastra sudah terdapat dalam kitab-kitab Sruti. Sebagai diketahui masing-masing kitab Sruti mempunyai Upaveda tersendiri. Kitab Upaveda dari Rgveda adalah kitab Ayurveda, Kitab Upaveda dari Yajurveda adalah kitab Dhanurveda, Kitab Upaveda dari Samaveda adalah Kitab Gandharvaveda dan kitab Upaveda dari Atharvaveda adalah kitab Arthaveda. Kitab Arthaveda dikenal sebagai kitab yang memuat pengetahuan tentang pemerintahan, ekonomi, pertanian, ilmu sosial dan lain sebagainya. Jadi Arthaveda merupakan kitab Sruti yang memuat ajaran Nitisastra.

2.2.2 Kitab-Kitab Smerti.

Kitab Nitisastra tersebar dalam kitab-kitab Smerti, Kitab Manava Dharmasastra memuai ajaran-ajaran Bhagavan Manu yang dihimpun dan disusun oleh Bhagavan Bhrigu banyak sekali memuat ajaran-ajaran Nitisastra. Dalam Adhyaya VII memuat berbagai peraturan tentang kenegaraan sedangkan pada Adhyaya VIII memuat berbagai aspek hukum yang juga berkaitan dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam kitab ini kita menemukah penggunaan istilah Raja Dharma.

*RAJADHARMAM PRAVAKSYAMI
YATHA VRTTO BHAVEN NRPAH
SAMBHAVASCA YATHA TASYA
SIDDHISCA PARAMAYATHA*

(Manava Dharmasastra VII.1)

artinya :

Akan saya nyatakan dan perlihatkan tentang kewajiban Raja (Raja Dharma) bagaimana Raja seharusnya berbuat untuk dirinya sendiri, bagaimaria ia dijadikan dan bagaimana ia dapat mencapai kesempurnaanya yang tertinggi.

“Raja” dalam pengertian ini dapat dipersamakan dengan kepala Negara, kata “dijadikan” mengandung pengertian bagaimana kepala Negara dipilih, dilantik dan mengapa diperlukan adanya Raja atau kepala Negara bagi masyarakat.

2.2.3 Kitab-Kitab Itihasa

Kitab Ramayana dan Kitab Mahabharata merupakan dua kitab yang memuat dua epos besar yang juga disebut Viracarita. Kedua kitab ini menceritakan tentang kepahlawanan yang keseluruhannya memuat tentang etika dan cara-cara mengelola pemerintahan Negara. Itihasa Ramayana dan Mahabharata sangat berkaitan dengan sejarah perkembangan Agama Hindu dimasa lalu. Dapat dikatakan keseluruhan kitab Ramayana dan Mahabharata memuat ajaran tentang Nitisastra. Dalam Ramayana Kakawin, misalnya yang sangat populer di Indonesia terdapat uraian tentang asas-asas kepemimpinan yang disebut Asta Brata. Uraian tentang ajaran Asta Brata ini sebelumnya sudah termuat dalam kitab Manava Dharmasastra tetapi belum disebut Asta Brata. Seperti diketahui kakawin Ramayana digubah pada jaman kerajaan Hindu di Indonesia secara tradisional dianggap digubah oleh Empu Yogiswara.

2.2.4 Kitab-Kitab Purana

Kitab Purana dikenal pula sebagai kitab yang memuat ceritera-ceritera kuno yang menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu. Kitab Purana memuat ceritera dewa-dewa, raja-raja dan rsi-rsi pada jaman kuno. Kitab-kitab Purana ini banyak jumlahnya dan bila dicermati didalamnya banyak memuat ajaran tentang Nitisastra.

2.2.5 Kitab-Kitab, Lontar-Lontar Maupun Naskah-Naskah Lainnya Yang Bersumber Dari Naskah Sansekerta Maupun Jawa Kuno.

Slokantara maupun Sarasamuccaya juga memuat tentang ajaran Nitisastra yang kadang-kadang dikemas dalam bentuk ceritera yang mengandung kiasan tentang pemerintahan maupun masalah sosial. Dalam Tantri Kamandaka banyak sekali ceritera-ceritera yang memuat ajaran Nitisastra. Di daerah Bali yang sebagian besar pehuduknya penganut Hindu, merupakan daerah yang subur menumbunkan karya sastra Agama Hindu. Ada beberapa lontar yang memakai judul Niti Seperti: Niti Praja,

Nitisastra atau Niti Sara, Rajaniti, Niti Raja Sesana, Dharma Sesana. Isi naskah-naskah ini tidak begitu jauh berbeda dengan naskah-naskah niti yang lainnya.

Contoh :

*SINGHA RAKSAKANING HALAS
HALAS IKANG RAGSENG HARE NITYASA
SINGHA MWANG WANA TAN PADIRT
PADA WIRODANGDAH TIKANG KESARI
RUG BRASTANG WANA DENIKANG JANA
TINON WREKSANYA SIRNA PADANG
SINGHANGAT RI JURANG NIKANG TEGAL AYUN ADANG
SAMPUN DINON DUR LABA*

Artinya :

Singa adalah penjaga hutan, hutan selalu melindungi singa, jika singa dengan hutan berselisih, mereka marah lalu singa meninggalkan hutan. Hutan dirusak dan pohon-pohon ditebangi orang sampai menjadi terang, Singa lari bersembunyi dalam lembah atau di te'ngah-tengah ladang, diserbu dan dibinasakan orang.

Jadi karena tidak bersatu antara hutan dan singa, hutan menjadi rusak-karena ditebangi orang dan singapun mati dibunuh orang karena tidak mempunyai tempat tinggal, kedua-duanya hancur.

Demikialah gambaran singa sebagai kepala Negara (pemerintah) tidak saling mementingkan (saling dukung) akhirnya kepala Negara (pemerintah) jatuh dan Negara (masyarakat) kacau.

2.3 Kontribusi Agama Hindu Dalam Kehidupan Politik

Lahirnya Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan lambang Negara Garuda Pancasila dengan Sasanti Bhinneka Tunggal Ika adalah sangat tepat. di dukung pemilihan yang amat cermat dari para pendiri Negara yang mengamati kondisi nyata bangsa Indonesia yang memang amat majemuk.

2.3.1 Dari Negara kesatuan terpuruk ke alam penjajahan

Ketika Gajah Mada dilantik menjadi Maha Patih Kerajaan Majapahit di pendopo Agung kerajaan disaksikan oleh raja dan segenap pejabat kerajaan, ia mengucapkan sumpah yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Inti dari Sumpah Palapa itu adalah tekad untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara dalam satu kesatuan Negara yang merdeka dan berdaulat. Walaupun banyak pejabat Negara yang menyangsikan ucapan Gajah Mada itu, namun Maha Patih Gajah Mada itu, namun Maha Patih itu kukuh pada pendiriannya, tidak pernah bergeser dari tekad dan upaya menyatukan Nusantara. Secara mantap dan pasti satu persatu wilayah-wilayah nusantara yang tadinya merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang terpisah-pisah dipersatukan dalam satu Negara yang besar, yaitu Negara Majapahit. Seluruh Nusantara bersatu, panji-panji majapahit “Gula Kelapa, Merah Putih” berkibar di seluruh wilayah Nusantara. Majapahit mencapai masa kejayaannya. Cita-cita Negara Kesatuan yang dicetuskan oleh pusat pemerintahan yang sudah terwujud. Sejarah telah membuktikan bahwa Majapahit telah meletakkan dasar-dasar Negara Kesatuan.

Waktu beredar terus, sejarahpun membuktikan pula Saka kala Sirna Hilang, Kertaning Bhumi, Tahun Saka 1400 (1478 Masehi) Majapahit sebagai Negara Kesatuan runtuh, sampai kesatuan nusantara putus bukan karena serangan dari luar melainkan karena pelapukan, wilayah nusantarapun cerai berai kembali, masing-masing berjalan sendiri-sendiri lagi. Gaung persatuan lenyap tidak ada gemanya lagi, nusantara mulai diliputi kabut gelap.

Pada percaturan politik dunia saat-saat itu, kaum kapitalis kolonial sudah mulai mengincar wilayah nusantara dengan kedatangan orang-orang Portugis dan kemudian Belanda yang semula didorong oleh kepentingan ekonomi: Belanda berhasil mendapat fasilitas di Batavia, maka berdirilah Verenigde Cost Indische Compagnie (VOC) sekitar tahun 1602, yang semula hanya merupakan kongsi dagang. Untuk memuluskan tujuan ekonominya, VOC. Kemudian mengembangkah politik imperialisme dan penjajahan. Sejak saat itu berangsur-angsur nusantara mulai dikuasai, sehingga akhirnya seluruh nusantara berada dalam kekuasaan penjajahan Belanda. Nusantara diperkenalkan dengan nama Hindia Belanda. Akibatnya hilangnya rasa persatuan dan kesatuan setelah

Majapahit runtuh sekitar tiga setengah abad nusantara tenggelam dalam penjajahan Belanda.

2.3.2 Lahir Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Alam penjajahan menyebabkan seluruh penduduk nusantara berada dalam penindasan, tanpa harga diri apalagi kekuasaan. Semua kekayaan alam termasuk potensi manusianya dikuras oleh penjajah, sehingga akibatnya nusantara merupakan wilayah miskin dan terbelakang. Sejarah memberikan pengalaman bahwa akibat terkoyaknya persatuanlah yang menjerumuskan nusantara ke dalam penjajahan.

Perkembangan politik dunia Internasional pada saat itu ikut memberi pengaruh bangkitnya rasa kesadaran nasional, kesadaran berbangsa. Sejak timbulnya Kebangkitan Nasional telah dirasakan pentingnya mewujudkan persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa. Cita-cita persatuan Indonesia yang dipelopori organisasi sosial politik seperti Budi Utomo dan lain-lainya, gaungnya juga bergema dikalangan golongan pemuda seluruh nusantara yang kemudian perwakilan para pemuda itu pada tanggal 28 Oktober 1928, melahirkan Sumpah Pemuda yang mencetuskan : Satu Nusa, Satu Bangsa. dan Satu Bahasa yaitu Indonesia. Cita-cita persatuan Indonesia yang telah diikrarkan sebagai suatu sumpah oleh Putra Putri Indonesia mempunyai nilai keyakinan dan tekad yang sangat kuat dan mendalam karena mengandung pengertian perjuangan yang harus di wujudkan secara nyata tanpa memperdulikan korban yang akan timbul. Sumpah Pemuda menjadi semen (perekat) kesadaran persatuan Bangsa, sehingga untuk kepentingan Persatuan Indonesia dalam memperjuangkan cita-cita itu, setiap orang harus rela berkorban dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan sewaktu-waktu. Persatuan Bangsa itu diperlukan. Pada hakekatnya persatuan Indonesia itu lahir dari rasa kesadaran bahwa untuk mencapai tujuan kemerdekaan persatuan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, demikian pula untuk mempertahankan .kemerdekaan, membangun dan mengisi kepentingan Bangsa dan Negara.

Akhirnya berkat persatuan dan kesatuan bangsa, perjuangan Bangsa Indonesia mencapai puncaknya dengan di Proklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia

pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta selaku wakil Bangsa Indonesia. Pada hari itulah lahirnya Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara berdasarkan Pancasila dengan Konstitusi UUD 1945, serta lambang Negara Garuda Panca Sila dengan Sasanti Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa daerah, dan adat istiadat, kebudayaan dan Agama, semua mendukung memberi kontribusi masing-masing.

2.3.3 Kontribusi Agama Hindu Dalam Kehidupan Politik Berbangsa dan Bernegara

Lahirnya bangsa dan Negara kesatuan Indonesia dengan dasar Pancasila dan lambang Negara Garuda Pancasila dengan Sasanti Bhinneka Tunggal Ika adalah sangat tepat. di dukung pemilihan yang amat cermat dari para pendiri Negara yang mengamati kondisi nyata bangsa Indonesia yang memang amat majemuk.

Sasanti Bhinneka Tunggal Ika diangkat dari karya Rakawi Empu Tantular dalam Kakawin Sutasoma, yang memaparkan kondisi komunikasi antara Agama Hindu dengan Agama Budha pada masa itu. Baris lengkapnya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. Kalimat ini adalah kalimat dalam bahasa Jawa Kuno. Kata Bhinneka terdiri dari kata Bhina yang artinya berbeda-beda, dan kata tunggal yang artinya satu, Ika artinya itu. Tan Hana artinya tidak ada. Dharma artinya kewajiban. Mangrwa artinya Mendua, secara harafiah maka kalimat itu berarti berbeda-beda itu, satu, itu, tidak ada kebajikan/kebenaran/kewajiban mendua. Kalimat ini mengandung ajaran Nitisastra yang tinggi dan sesuai dengan bangsa dan negara kesatuan Indonesia. Dalam konteks politik berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa dan Negara ini kalimat sasanti ini mempunyai makna bahwa Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu, sebagai warga Negara Indonesia tidak ada kebajikan yang mendua kecuali cinta pada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasanti Bhinneka Tunggal Ika merupakan basis politik yang patut dipedomani dalam menentukan kebijakan apapun dalam penyelenggaraan Negara ini. Dalam pustaka Arthava Veda terdapat mantram yang menjiwai rumusan yang dikembangkan oleh empu Tantular tadi sebagai berikut:

*JANAM BIBHRATI BAHUDA VIVACASAM
MANA DHARMANAM PRTHIVI YATHAUKASAM*

*SAHASRAM DHARA DRAVINASYA ME DUHAM
DHRUVEVA dHENUR ANA PAS PHURANTI*

(Atharvaveda XII.1.45)

(Semoga bumi yang memberi tempat tinggal kepada penduduk yang berbicara berbeda-beda bahasa berbeda-beda tata cara agama menurut tempat tinggalnya memperkaya hamba dengan ribuan pahala laksana lembu yang menyusui anaknya tak pernah kekurangan).

Dalam konteks Negara Indonesia mantra Veda ini menegaskan bahwa Bangsa Indonesia terdiri dari berjenis-jenis suku menempati wilayah Indonesia yang satu diharapkan mendapat jaminan dan kesempatan yang sama serta layak dalam menikmati sumber alam Indonesia, hidup bersatu dan damai sehingga kebahagiaan dapat tercapai.

Persatuan dalam kebhinnekaan itu pada dasarnya bersifat dinamis, tidak mengecilkan arti setiap unsur budaya bangsa dan perbedaan agama yang ada diantara warga negara Indonesia. Semua kegiatan yang bertujuan memajukan dan mencerdaskan anggota masyarakat dalam bidang apapun juga hendaklah didasarkan atas kesadaran bahwa usaha-usaha itu tidak mengganggu atau melemahkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Veda jelas-jelas menganjurkan persatuan karena dengan persatuan itu sesungguhnya kebahagiaan bersama dapat dicapai. Persatuan yang dimaksud bukanlah hanya antara sesama Agama melainkan persatuan dengan semua golongan yang berbeda-beda seperti yang dimaksud Sasanti Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menggalang dan membina persatuan ini dalam Veda juga terdapat beberapa petunjuk diantaranya dalam Rgveda X.191 mantra 2 - 4 sebagai berikut:

*SAM GACCHADHVAM SAM VADADHUAM SAM WO
MANAMSI JANATAM. DEVA BHAGAM YATHA PURVE
SAM JNANA UPA SATE*

(Berkumpul berbicara satu dengan yang lain bersatulah dalam pikiranmu seperti pada dewa pada jaman dahulu bersatu).

*SAMANO MANTRAH SAMITIH SAMANI
SAMANAM MANAH SAHA CITTAM ASAM
SAMANAM MANTRAM ABHI MANTRAYE VAH
SAMANENA WO HAWISA JUBHOBHI*

(Hendaknya tujuan mu sama, bersama dalam musyawarah, bawalah pikiran itu dan persatukanlah pikiran itu untuk maksud yang sama. Aku ajarkan kepadamu untuk bersembah dengan caramu yang biasa).

*SAMANI VA AKUTIH SAMANA KRDAYANI VA
SAMANAM ASTU VO MANO YATHA VA SUSAHASATI*

(Samakanlah tujuanmu, samakan pula niatmu hendaknya sehingga pikiranmu satu engkau dapat hidup bersama dengan bahagia)

Politik berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia pada dasarnya adalah penanaman kesadaran bahwa berdasarkan sejarahnya kita adalah satu Bangsa Indonesia yang menempati satu Negara, yaitu: Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran inilah yang perlu dipupuk dan dikembangkan dari khasanah budaya bangsa termasuk dari nilai-nilai ajaran Agama.

2.4 Ajaran Kepemimpinan/Politik Hindu

Mengingat Nitisastra/ilmu politik/ilmu kepemimpinan Hindu demikian luasnya, maka pada uraian selanjutnya akan dibatasi pada ajaran kepemimpinan Hindu di antaranya: Catur Pariksa, Astabrata, Pancadasa Paramiteng Prabhu, Sadvarnaning Nrpati, Panca Upaya Sandhi, dan Nawa Natya.

2.4.1 Catur Pariksa

Catur Pariksa atau disebut juga dengan nama Catur Naya Sandhi ini dapat kita jumpai dalam kakawin Ramayana (berbahasa Jawa Kuno) yang terdiri dari:

- 1) *Sama*, mampu mengendalikan rakyat, terutama kawan yang setia. Dalam hal kepemimpinan seseorang juga hendaknya berbuat adil, memandang dan berbuat sama terhadap semua bawahannya.
- 2) *Bheda*, mengatur/memelihara tata tertib dan disiplin pengendali pemerintahan termasuk pemuka agama yang berbeda-beda.
- 3) *Dana*, mengusahakan sandang, pangan dan papan untuk dapat memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 4) *Danda*, menghukum secara adil siapapun yang berbuat salah.

2.4.2 Astabrata

Di dalam Manavadharmasastra yang dikenal juga dengan nama Vedasmṛti disebutkan perilaku seorang pemimpin hendaknya seperti perilaku para deva:

*“Indrasya arkasya vayosca
yamasya varunasya ca
candrasya agneh prthivyasca
tejo vrtam nṛpascaret”*

(Hendaknya seorang pemimpin berbuat seperti perilaku deva Indra, Surya, Vayu, Yama, Varuna, Candra, Agni, dan Prthivi)

Sikap dan sifat kepemimpinan dikenal dan populer dengan nama Astabrata dan dimasukkan dalam kakawin Ramayana berbahasa Jawa Kuno, merupakan nasihat Sri Rama kepada Vibhisana

*“Hyan indra yama surya candranila kuvera baruna agni nahan wwalu,
sira tam aka anga san bhupatimatan nira inisti astabrata”*

Ramayana XXV.52

(Dewa Indra, Yama, Surya, Candra, Anila, Kuvera, Varuna dan Agni adalah delapan dewata (sifat dan sikapnya) patut ditiru oleh seorang pemimpin agar meresap dalam jiwa dan raganya)

Lebih jauh diuraikan sifat dan sikap yang patut dimiliki dan dilaksanakan oleh seorang pemimpin sesuai ajaran Astabrata, sebagai berikut:

- 1) *Indrabrata*, para pemimpin hendaknya mengikuti sifat dan sikap deva Indra, deva hujan. Hujan adalah sumber kemakmuran, dengan demikian seorang pemimpin hendaknya berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
- 2) *Yamabrata*, para pemimpin hendaknya memiliki sifat dan sikap seperti deva Yama, yakni adil dalam menegakkan hukum dan keadilan.
- 3) *Suryabrata*, pemimpin hendaknya mampu memberi penerangan seperti halnya deva Surya, di samping senantiasa meningkatkan tanggung jawab dan pengabdian seluruh rakyat yang dipimpinnya.
- 4) *Candrabrata*, pemimpin hendaknya mampu memperlihatkan wajah yang tenang, kata-kata yang menyejukkan dan mampu menarik simpati seluruh rakyatnya seperti halnya bulan memberikan kesejukan.

- 5) *Bayubrata*, pemimpin selalu mengetahui dan menyelidiki keadaan ataupun keinginan rakyatnya terutama mereka yang miskin dan menderita dan mampu mendengar jerit hati nurani mereka seperti angin yang memberikan kesegaran.
- 6) *Kuvera* atau *Danandhabrata*, seperti halnya deva Kuvera atau Danandha yang mampu mengendalikan uang dan kekayaan Negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kuverabrata ini disebut juga *Arthabrata*.
- 7) *Varunabrata*, artinya sifat dan perilaku seperti deva Varuna (penguasa samudra raya), pemimpin hendaknya mampu membasmi berbagai penderitaan dan penyakit dalam masyarakat.
- 8) *Agnibrata*, yakni sifat dan perilaku sebagai deva Api, pemimpin hendaknya memiliki sifat dan jiwa Kesatriya dan sebagai pandita, mampu menggerakkan masyarakat untuk mensukseskan program kerja memiliki kebijaksanaan untuk menatap masa depan rakyatnya.

Demikian, ajaran Astabrata ini sangat populer di masyarakat bahkan juga dikembangkan dalam ajaran kepemimpinan Sultan Paku Bhuwono III di Keraton Surakarta.

2.4.3 Pancadasa Paramiteng Prabhu

Dalam kitab *Nagarakrtagama*, rakawi Prapanca yang menyusun kitab ini melukiskan sifat-sifat kepemimpinan Gajah Mada yang berhasil memimpin kerajaan Nusantara Majapahit. Sifat utama Gajah Mada ini dirangkum dalam 15 sifat yang dikenal dengan nama Pancadasa Paramiteng Prabhu, dan hal ini dikomentari oleh Prof. Mohammad Yamin, dalam bukunya yang berjudul *Gajah Mada*. Sifat-sifat utama kepemimpinan Gajah Mada itu adalah:

- 1) *Vicaksana*, berlaku bijaksana.
- 2) *Mantrivira*, pemberani menekkan kebenaran
- 3) *Vicaksanengnaya*, bijaksana dalam memimpin.
- 4) *Natangwan*, mendapat kepercayaan rakyat dan Negara.
- 5) *Satyabhakti Aprabhu*, selalu setia kepada atasan.
- 6) *Vagmivak*, pandai bicara dan berdiplomasi.
- 7) *Sarjava Upasava*, sabar dan rendah hati.

- 8) *Dhirotsaha*, teguh hati dalam segala usaha.
- 9) *Tulalana*, teguh iman, riang dan selalu antusias.
- 10) *Dibyacitta*, lapang dada, menghargai pendapat orang lain.
- 11) *Tansatrsna*, tidak terikat kepentingan pribadi.
- 12) *Masihtasabhuvana*, menyangi setiap makhluk dan alam lingkungan.
- 13) *Ginengpratidina*, setiap hari senantiasa berbuat baik.
- 14) *Sumantri*, taat dan ptuh menjadi abdi Negara dan penasihat baik.
- 15) *Amayakenmusuh*, mampu menghancurkan musuh-musuh Negara.

2.4.4 Sadwarnaning Rajaniti

Menurut teori Hindu Kuno yang dimuat dalam kitab “Substance of Hindu Polity” yang disusun oleh Chandra Prakash Bhambari menyebutkan enam syarat seorang pemimpin yang dapat diberi istilah Sadwarnaning Rajaniti, yaitu:

- 1) *Abhigamika*, pemimpin harus mampu menarik perhatian positif dari rakyatnya.
- 2) *Prajna*, pemimpin harus bijaksana.
- 3) *Utsaha*, pemimpin harus kreatif mengembangkan usaha.
- 4) *Atmasampad*, pemimpin harus bermoral luhur.
- 5) *Sakhyasamanta*, pemimpin harus mampu mengontrol bawahan.
- 6) *Aksudraparisakta*, pemimpin harus mampu memimpin rapat atau sidang dan dapat menarik kesimpulan secara bijaksana.

2.4.5 Panca Upaya Sandhi

Dalam sebuah naskah lontar bernama Sivabuddhagama Tattva disebutkan lima Upaya Sandhi, yang harus dilakukan oleh seorang dalam menghadapi musuh Negara maupun mengatasi berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawabnya, yang terdiri dari:

- 1) *Maya*, pemimpin harus mampu berupaya mengumpulkan data yang dapat yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
- 2) *Upeksha*, pemimpin harus mampu menganalisa, meneliti semua bahan, data atau informasi untuk menyelesaikan persoalan menurut proporsinya.
- 3) *Indrajala*, pemimpin harus mampu menyelesaikan dan mengatasi atau mencari jalan keluar dalam memecahkan berbagai masalah.

- 4) *Vikrama*, pemimpin harus mampu melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan sebagai jalan untuk mengatasi berbagai masalah.
- 5) *Lokika*, pemimpin harus mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang sehingga menemukan alternatif terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

2.4.6 Navanatya

Didalam lontar berbahasa Jawa Kuno bernama Navanatya diperoleh penjelasan bahwa seorang pemimpin di dalam memilih pembantu-pembantu dekatnya harus bijaksana. Kebijaksanaan itu diumpamakan memilih segunung bibit bunga yang akan ditanam dalam sebuah taman. Hendaknya yang dipilih bunga yang harum baunya, indah warnanya, yang tidak cepat layu serta mempunyai manfaat utama, memberikan kepuasan bagi yang melihat atau memakainya.

Demikianlah seorang pemimpin dalam memilih pembantu-pembantu dekatnya seperti memilih bibit bunga itu. Adapun yang patut dipilih atau ditunjuk adalah sebagai berikut:

- 1) *Prajna Vidagda*, bijaksana dan mahir dalam berbagai cabang ilmu dan teguh pendirian.
- 2) *Virasarvayuddha*, pembrani, pantang menyerah dalam pertempuran.
- 3) *Pramartha*, mempunyai sifat mulia dan luhur.
- 4) *Dhirotsaha*, ulet dalam mensukseskan tugas.
- 5) *Pragivakva*, pandai berbicara dan mempengaruhi massa.
- 6) *Samaupaya*, setia kepada janji atau sumpah.
- 7) *Laghavangartha*, tidak pamrih terhadap harta benda.
- 8) *Wruh ring sarwa bhrasta*, tahu mengatasi permusuhan.
- 9) *Vivika*, mampu membedakan antara yang salah dan benar, baik dan buruk.

III KESIMPULAN

Politik menurut perspektif Hindu adalah kebahagiaan, sebuah kondisi bathin di mana seseorang tidak merasa ketertekanan, penderitaan dan sejenisnya. Dalam konteks ini, agama Hindu menawarkan pola hidup sederhana. Sebab hanya dengan pola seperti ini sebuah masyarakat akan selalu ingat dengan tujuannya yang tertinggi yaitu

kebahagiaan. Jika mereka memenuhi indria-indrianya maka mereka akan terjebak pada maya atau keadaan seolah-olah yang semakin menjerumuskan masyarakat. Dalam konteks pemikiran seperti ini, pragmatisme politik tergolong sebagai pemikiran yang dipengaruhi oleh maya atau keadaan yang seolah-olah bantuan keuangan seakan-akan telah memberikan kontribusi bagi masyarakat. Padahal kenyataan itu bisa sebaliknya, sebab tuntutan seperti itu bukan tidak mungkin menyebarkan budaya korupsi di kalangan penyelenggara pemerintahan. Sebab mereka memerlukan modal yang besar untuk duduk di pemerintahan. Korupsi seperti ini tentu akan mengurangi jatah bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada kondisi seperti ini pragmatisme politik seperti itu tidak akan membawa kebahagiaan, tetapi malah sebaliknya. Jadi berkenaan dengan ini masyarakat Bali perlu melakukan gerakan hidup sederhana dengan meminimalisasi keindahan-keindahan material pada berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hindu politik harus dijalankan sesuai dengan petunjuk sastra, seperti yang dimuat dalam niti sastra, manawa dharma sastra, raja dharma, raja niti, itihasa maupun lontar-lontar yang telah ada. Apabila politik dilaksanakan sesuai dengan sastra akan lahir politik yang berkarakter, beretika, bijaksana dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan dengan tujuan mencapai masyarakat yang sejahtera, damai adil dan makmur.

Mengenai Nitisastra/ilmu politik/ilmu kepemimpinan Hindu demikian luasnya, maka pada uraian ini dibatasi pada ajaran kepemimpinan Hindu di antaranya: Catur Pariksa, Astabrata, Pancadasa Paramiteng Prabhu, Sadvarnaning Nrpati, Panca Upaya Sandhi, dan Nawa Natya.

IV KEPUSTAKAAN

- Cudamani, 1993. *Pengantar Agama Hindu*. Hanuman Sakti: Jakarta.
- Darmayasa. 1992. *Canakya Nitisastra*. Hanuman Sakti: Jakarta.
- Dinas Pendidikan Dasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. 1993. *Kakawin Sutasoma*. N.V. Percetakan Bali: Denpasar.
- . 1997. *Kakawin Ramayana*. N.V. Percetakan Bali: Denpasar.
- Gonrda, I Gusti Ngurah. 1999. *Manajemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Provinsi Bali dalam Perspektif Era Globalisasi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja bekerja sama dengan Widya Kriya Gematama: Denpasar.
- Kadjeng, I Nyoman, 1970/1971. *Sarasamuccaya*, Proyek Penerbitan Kitab Suci Hindu dan Buddha Direktorat Djendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha Departemen Agama R.I.
- Latra, I Wayan dkk. 2015. *Pendidikan Agama Hindu Dalam Membangun Karakter Bangsa*. Disusun Untuk Materi Pembelajaran Matakuliah Pendidikan Agama Hindu di Lingkungan Universitas Udayana. Udayana University Press: Denpasar.
- Mantra, Prof. Dr . IB. 2009. *Bhagawadgita Alih Bahasa & Terjemahan Percetakan Buku-Buku Penuntun Agama Hindu Pesraman Remaja*. Denpasar.
- Pudja, Gde. 1979. *Sarasamuccaya*. Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu Departemen Agama RI.: Jakarta.
- . 1981. *Bhagawadgita Pancama Weda*. Jakarta: Maya Sari.
- Pudja, G, MA, SH, dan Sudharta Tjokorda Rai. 1973. *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti*. Paramita. Surabaya.
- Punyatmadja, I.B. Oka: 1976. *Panca Cradha*. Parisada Hindu Dharma Pusat: Denpasar.
- Sura, I Gede. 1985. *Pengendalian Diri dan Etika Dalam Agama Hindu*. Hanuman Sakti: Jakarta.
- Titib, I Made. 2006. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Paramita: Surabaya